

## **PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN**

**Oleh :**

**Maria Maya Lestari, SH, MH. M.Sc.**

### **Abstrak**

Pengakuan rezim hukum laut mengenai konsep negara kepulauan secara otomatis memberikan kita hak dan kewajiban atas segala sumber daya alam hayati terutama perikanan yang ada baik di laut teritorial sampai dengan zona ekonomi eksklusif. Namun dalam penegakan hukum, mengalami kelemahan tidak hanya dari beda peristilahan barang /dan atau alat bukti dengan barang sitaan sehingga akan membuat kegalauan dalam proses pembuktian di depan persidangan. Selain itu ternyata masalah bahasa juga mendapatkan perhatian dalam praktek dilapangan dimana pada beberapa kasus, para tersangka ada yang tidak bisa berbahasa Inggris apalagi berbahasa Indonesia.

### **Abstract**

*Recognition of the legal regime of the sea on the concept of island states automatically grant us the rights and obligations of all natural resources, especially fisheries that exist both in the territorial sea up to the exclusive economic zone. But in law enforcement, having not only the weakness of the different terminology goods / and or the evidence seized goods that will create turmoil in the process of proving before trial. Beside that the language issue is also getting attention in the practice field where, in some cases, the suspects were there who could not speak English let alone speak Indonesian.*

**Kata Kunci : Peradilan perikanan, Hukum Laut**

### **A. Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pasca diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982 menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 telah membuktikan bahwa kita menerima segala ketentuan dan mesti melaksanakan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang tersebut. Selain itu dengan adanya pengakuan rejim hukum laut mengenai konsep negara kepulauan secara otomatis memberikan kita hak dan kewajiban atas segala sumber daya alam hayati terutama perikanan yang ada baik di laut teritorial sampai dengan zona ekonomi eksklusif.

Rejim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara sesuai amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia<sup>1</sup>; Masalah rejim negara kepulauan ini mulai muncul, pasca diberikannya kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara atas sumber daya alam terutama perikanan mereka. Dimana berdasarkan konvensi Hukum Laut 1982 tersebut dinyatakan bahwa negara pantai mempunyai hak mengelola segala bentuk sumber perikanan di laut teritorialnya sampai dengan zona ekonomi eksklusifnya.

Permasalahan lain mulai muncul ketika tindakan pencurian ikan mulai marak terjadi baik di zona ekonomi eksklusif maupun di laut teritorial Indonesia. Akibat dari luasnya wilayah perairan Indonesia, dan lemahnya pengawasan pihak berwenang terhadap kegiatan perikanan, seringkali dimanfaatkan nelayan asing untuk melakukan *illegal fishing* di laut teritorial Indonesia.<sup>2</sup> Praktik *illegal fishing* atau pencurian ikan di perairan Indonesia masih terus berlangsung. Kerugian akibat praktik tersebut mencapai hingga Rp 30 triliun setiap tahun. Atau, sekitar 25 persen total potensi perikanan yang ada, yaitu 1,6 juta ton per tahun.<sup>3</sup>

Sebagai "*Shared stocks*" yang tidak dapat dicegah berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, meskipun ada juga ikan yang menetap di wilayah tertentu. Perpindahan ini tidak menjadi masalah jika masih terjadi di dalam satu wilayah Negara, akan tetapi jika perairan yang dijelajahi melintasi wilayah beberapa Negara maka pemanfaatan dan pengelolaan ikan tersebut tidak dapat hanya diserahkan kepada satu negara tertentu, akan tetapi harus melibatkan Negara-negara yang berkepentingannya.<sup>4</sup>

Tindakan penangkapan ikan yang melanggar hukum (*illegal fishing*) pada dasarnya dapat diatasi dengan ketentuan peraturan nasional

---

<sup>1</sup> Menimbang angka c, Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang : Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut)

<sup>2</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f84f7fe8617f/indonesia-didesak-naikkan-sanksi-illegal-fishing-i>, diunduh pada Rabu, 2 Mei 2012, pukul 11.01 wib.

<sup>3</sup> [http://jurnal-dfp.blogspot.com/2008\\_02\\_01\\_archive.html](http://jurnal-dfp.blogspot.com/2008_02_01_archive.html), diunduh pada rabu, 2 Mei 2012

<sup>4</sup> Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional Hukum yang Hidup, Diadit Media, Jakarta, 2007, Hal. 120

yang kuat, dan dalam hal ini Indonesia sudah cukup maju mendesain peraturan nasionalnya, akan tetapi penerapan dan penegakan hukum di lapangan masih sangat perlu mendapatkan perhatian.<sup>5</sup>

Di sisi lain, adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.<sup>6</sup>

Penegakan hukum dalam bidang perikanan dirasakan sangat diperlukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di lapangan, hal sangat perlu dalam penegakan hukum nasional Indonesia untuk wilayah laut terutama perikananannya. Pemerintah Indonesia telah pula mengeluarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menjadi payung hukum dalam pengaturan perikanan di Indonesia.

Undang-undang perikanan yang ada, akan menjadi acuan dan panduan dalam melakukan tindakan penegakan hukum baik oleh aparat hukum maupun oleh aparat berwenang lainnya. Serta dengan adanya undang-undang perikanan ini maka akan dapat ditentukan tindakan hukum yang bagaimana yang dapat dikenakan bagi para pelaku pencurian ikan di wilayah laut Indonesia.

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebutlah, Pasal 71 menjelaskan bahwa pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada berada di lingkungan peradilan umum. Dan untuk pertama kali pengadilan perikanan telah dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.

Khusus untuk Pulau Sumatera, satu-satunya pengadilan negeri yang berwenang menangani perkara pidana perikanan hanyalah Pengadilan Negeri Medan. Sehingga untuk semua kasus pidana yang berkaitan dengan perikanan yang terdekat di wilayah laut Pulau Sumatera

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 129

<sup>6</sup> Baca lebih lanjut dalam penjelasan Umum I, Paragraf 2, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

terutama Laut Cina Selatan dan Selat Malaka hanya dapat diadili di Pengadilan Negeri Medan.

Dengan maraknya tindakan pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal nelayan asing di wilayah perairan nusantara, dan tertentunya pengadilan yang berwenang mengadili kasus pencurian ikan (*hanya ada 5 pengadilan perikanan di Indonesia*), sedangkan luas wilayah pesisir laut Indonesia mencapai 81.000 km, dan terdiri dari 17.500 pulau. Maka dalam rangka mengkaji penegakan hukum pidana dibidang perikanan, perlu suatu kajian mengenai bagaimanakah "*Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan*"

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka permasalahan yang di kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Negeri Medan dalam menangani perkara pidana perikanan menurut peraturan perundangan?
2. Berapakah jumlah kasus pidana perikanan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Medan pasca dikeluarkannya UU Perikanan nomor 45 tahun 2009?
3. Apa sajakah tantangan dan hambatan dalam melakukan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Medan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Negeri Medan dalam menangani perkara pidana perikanan menurut hukum peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Untuk mengetahui jumlah kasus yang telah ditangani oleh pengadilan negeri Medan dalam menangani.
3. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum di Pengadilan Negeri Medan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum terutama para akademisi dan mahasiswa yang tertarik akan materi dibidang kelautan terutama hukum perikanan sebagai salah satu cabang ilmu dari hukum laut.

## 2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi pencerahan dan penyegaran keilmuan bagi kalangan akademisi dan praktisi yang tertarik dan berminat dalam bidang kelautan terutama penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia.

## B. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Kerangka Teori

Menurut Kaelan M.S. landasan teori suatu penelitian adalah merupakan dasa-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan relisasi pelaksanaan penelitian<sup>7</sup>. Ditinjau dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di awal tulisan, maka landasan/ *grandtheory* yang digunakan dalam kajian ini adalah teori “Negara Hukum Kesejahteraan / *welfare state*”, bahwa pengelolaan sumber daya perikanan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan dari masyarakat Indonesia Itu sendiri.

Untuk dapat melaksanakan pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud, diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan negara kita sebagai negara hukum. Hukum sengaja diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Di samping itu sebagai *middletheory* dipergunakan teori *law of agent of change* dimana hukum juga dapat mengubah perbuatan masyarakat, serta dipergunakan sebagai *social control* atau pengendalian sosial yang memaksa warga masyarakat untuk mengindahkan dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku<sup>8</sup> (*apply theory* yang digunakan adalah *law as a tool social enginarings*).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Adanya posisi Indonesia yang beradda di antara dua samudera tersebut, maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau yang lazim disebut “selat”. Indonesia yang berada pada posisi yang diapit oleh dua samudera tersebut juga menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia

---

<sup>7</sup> Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigama Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), hal. 239.

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 4

memiliki aneka sumber daya alam yang melimpah, salah satu di antaranya adalah "ikan" yang sangat berlimpah pula serta beraneka jenisnya.<sup>9</sup>

Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikannya, di mana potensi perikanan bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.605 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Produk perikanan tangkap di Indonesia pada tahun 2007 adalah 4.924.430 ton. Namun khusus untuk ikan tangkap Indonesia hingga saat ini Cuma sekitar 3,1 juta ton. Jauh di bawah Cina yang mencapai 46 juta ton atau India yang mencapai 3,2 juta ton. Bahkan produksi ikan Indonesia nyaris disalip Filipina yang hampir 3 juta ton, serta Thailand dan Vietnam masing-masing sekitar 1,6 juta ton. Padahal luas wilayah laut negara-negara itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia.<sup>10</sup>

Dengan panjang pantai 81.000 km, perairan pantai dan laut yang dimiliki oleh Indonesia mengandung potensi besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. Sejak dahulu bangsa Indonesia telah banyak memanfaatkan sumberdaya alam laut, walaupun demikian sebagian masih dengan cara tradisional. Hingga saat ini lebih dari sekitar 80 persen produksi perikanan laut dihasilkan oleh perikanan rakyat, yang sebagian besar beroperasi di pantai.<sup>11</sup>

Berbagai usaha pemanfaatan sumber daya alam laut telah dilakukan, tetapi masih banyak pula usaha pemanfaatan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut akan menimbulkan masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. Beberapa penyimpangan yang terjadi antara lain<sup>12</sup> :

- a. penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan beracun.
- b. Kegiatan pengusahaan perikanan relatif telah jenuh di dan adanya gejala-gejala tangkap lebih (over fishing)
- c. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai misalnya pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan pada daerah-daerah tangkap yang telah rawan kualitasnya banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati.

---

<sup>9</sup> Supriadi, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.1

<sup>10</sup> Ibid, hal. 3

<sup>11</sup> Dian Saptarini, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Wilayah Pesisir*, Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) dengan Kementrian Negara Lingkungan Hidup (Pusat Studi Lingkungan), Jakarta, 1996, Hal. III. 1

<sup>12</sup> Ibid, hal III.3

Selain hal diatas, tahun 2003 tercatat banyak tindakan aparat TNI Angkatan Laut terhadap kapal-kapal yang diduga menangkap ikan secara ilegal, baik kapal ikan asing maupun kapal ikan yang berbendera Indonesia. Tindakan tersebut tidak akan terlalu mengherankan jika memang kapal yang ditangkap, bahkan "ditenggelamkan" tersebut berbendera asing, akan tetapi ternyata yang terjadi di lapangan adalah banyaknya praktek pembenderaan kembali "reflagging" yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang hendak mencuri ikan dilaut nusantara.<sup>13</sup>

Berbagai kondisi dan permasalahan dibidang perikanan inilah maka pemerintah membuat pengaturan mengenai perikanan. Dasar hukum pertama mengenai perikanan di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 31 tahun 2004 dan diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Hal-hal pokok yang diatur dalam undang-undang ini, yakni : ruang lingkup Wilayah Negara yang meliputi wilayah daratan, wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hak-hak berdaulat Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen serta hak pengawasan di Zona Tambahan. Kewenangan Pemerintah melakukan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara serta Kawasan Perbatasan. Kelembagaan yang diberi kewenangan untuk melakukan penanganan Kawasan Perbatasan. Unsur keanggotaan kelembagaan ini berasal dari unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengingat posisi strategis wilayah perbatasan terkait dalam hal seperti kedaulatan negara, keutuhan wilayah, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat.

Hal lain yang diatur dalam undang-undang Perikanan ini adalah mengenai keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan Wilayah Negara termasuk Kawasan Perbatasan. Larangan dan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan Wilayah Negara dan batas-batasnya.

Adapun yang menjadi pertimbangan dari lahirnya undang-undang nomor 45 tahun 2009 perikanan ini adalah<sup>14</sup> :

- a. perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari

---

<sup>13</sup> Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional Hukum yang Hidup, Diadit Media, Jakarta, 2007, Hal. 99-100.

<sup>14</sup> Paragraf Menimbang huruf a, b dan c, Undang-undang nomor 45 tentang Perikanan

Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;

- b. pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.

Perikanan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>15</sup> Asas hukum dari segi bentuknya dapat dibedakan menjagi dua macam, yaitu asas dalam hukum dan asas dalam ilmu hukum. Asas dalam hukum meliputi norma hukum konkret yang bersifat normatif dan mempunyai kekuatan mengikat yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan asas dalam ilmu hukum berupa norma hukum abstrak yang merupakan landasan yang hendak diwujudkan melalui peraturan hukum yang konkret.<sup>16</sup>

Kemudian dari segi sifatnya, ada juga dua macam, yakni asas hukum umum dan asas hukum khusus. Suatu asas disebut asas hukum umum karena asasnya berlaku untuk seluruh bidang hukum, antara lain *lex spesialis derogat generalis*. Sedangkan asas hukum khusus adalah asas hukum yang berlaku untuk bidang hukum tertentu, seperti *presumption of innocence* hanya bidang hukum pidana saja.<sup>17</sup> Khusus untuk pengelolaan perikanan yang dilakukan di wilayah Indonesia asas-asas yang digunakan adalah asas yang terdapat dalam UU Perikanan itu sendiri, adapun asas-asasnya meliputi :

1. asas kedaulatan adalah pengelolaan Wilayah Negara harus senantiasa memperhatikan kedaulatan Wilayah Negara demi tetap terjaganya keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 1, Undang-undang nomor 45 tentang Perikanan

<sup>16</sup> Op Cit, Gatot Supramono, hal. 17

<sup>17</sup> *ibid*



2. asas kebangsaan adalah pengelolaan Wilayah Negara harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebhinekaan dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. asas kenusantaraan adalah pengelolaan Wilayah Negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh Wilayah Negara Indonesia.
4. asas keadilan" adalah pengelolaan Wilayah Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
5. asas keamanan adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional.
6. asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah pengelolaan Wilayah Negara harus menjamin terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.
7. asas kerja sama" adalah pengelolaan Wilayah Negara harus dilakukan melalui kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan.
8. asas kemanfaatan adalah pengelolaan Wilayah Negara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
9. asas pengayoman adalah pengelolaan Wilayah Negara harus mengayomi kepentingan seluruh warga negara khususnya masyarakat di Kawasan Perbatasan.

Dengan adanya asas-asas tersebut diharapkan sumber daya perikanan di Indonesia dapat menjadi selaras dengan tujuan Undang-undang dasar 1945 pasal 33, dimana segala sumber daya alam terutaman perikanan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Namun dalam penegakan hukum bila terjadi pelanggaran tetap mesti menjadi prioritas dalam pelaksanaan dilapangan. Secara keilmuan penegakan hukum itu sendiri meliputi penegakan hukum secara perdata yang nantinya akan membahas mengenai bidang keperdataan / privat, bidang penegakan hukum pidana yang mengatur mengenai bidang publik seperti pemenjaraan dan denda serta penegakan dibidang adminstrasi yang mengatur mengenai segala perizinan dan larangan yang ditetapkan sesuai dengan standar ketentuan pemerintah.

Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting danstrategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga

pembangunan perikanan dapat berjalan secara keberlanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-undang no 31 tahun 2004 jo Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana dibidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.<sup>18</sup>

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>19</sup>

Terdapat beberapa tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (khusus) dibidang perikanan, antara lain<sup>20</sup> :

1. Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3
  - a. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya.
  - b. Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
  - c. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau

---

<sup>18</sup> Sukardi, Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana di luar KUHP), Restu Agung, Jakarta, 2009, hal. 274-275

<sup>19</sup> Kansil, Pengantar hukum Indonesia (Semester Genap), Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 89

<sup>20</sup> Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan

- bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- d. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, flat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
2. Pasal 85
- Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang
3. Pasal 86
- a. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- b. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- c. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- d. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia
4. Pasal 87

- a. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan
  - b. Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan
5. Pasal 88  
Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
6. Pasal 89  
Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan
7. Pasal 90  
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia
8. Pasal 91  
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan
9. Pasal 92  
Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP
10. Pasal 93
  - a. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI

- b. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI
- 11. Pasal 94  
Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI
- 12. Pasal 95  
Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu
- 13. Pasal 96  
Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia
- 14. Pasal 97
  - a. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.
  - b. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya.
  - c. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- 15. Pasal 98  
Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar.
- 16. Pasal 99

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah.

17. Pasal 100

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan

18. Pasal 101

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

19. Pasal 102

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

20. Pasal 103

- a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran

21. Pasal 104

- a. Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- b. Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

22. Pasal 105

- a. Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.
- b. Kepada aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Menteri.

Tindak pidana perikanan merupakan tindak pidana khusus (*lex specialis*) karena pengaturannya hanya terdapat didalam UU Perikanan saja dan substansi pengaturannya juga secara khusus hanya mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan masalah perikanan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Untuk menyatukan persepsi dalam pembacaan dan pemahaman penulisan antara pembaca dan penulis maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa kerangka konsepsi yang meliputi<sup>21</sup> :

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kealngsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
4. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
5. Penyidikan perikanan adalah merupakan suatu penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan

---

<sup>21</sup> Undang-undang Perikanan nomor 31 tahun 2004 jo undang-undang nomor 45 tahun 2009, dalam Pasal 1

- untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
7. Pengadilan perikanan adalah pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
  8. Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud meliputi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tua

### **C. Metode Penelitian**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan cara mencari dan mengolah data penunjang lapangan untuk disesuaikan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan didukung dengan menggunakan data sekunder berupa hasil penelitian dan jurnal-jurnal, serta melakukan wawancara terbatas kepada narasumber yang berkompeten.

##### **a. Lokasi dan Waktu Penelitian.**

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan sebagai salah satu dan satu-satunya Pengadilan perikanan yang terdapat di Pulau Sumatera.

Sedangkan pelaksanaan penelitian dimulai dari memasukkan surat izin penelitian sampai dengan penyerahan laporan akan memakan waktu selama 6 bulan (dimulai dari bulan Mei sampai dengan November 2012).

##### **b. Cara Penentuan Sampel**

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penelitian dengan menggunakan sampel di mana tidak semua anggota populasi diambil sebagai sample, akan tetapi hanya populasi yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah dititipkan oleh peneliti berdasarkan tujuan dan permasalahan yang diangkat.

#### **2. Sumber data penelitian :**

##### **a. Data Primer :**

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji isi pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang nomor 45 tahun 2009 jo Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai



sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah perikanan di Indonesia.

b. Data Sekunder :

Meliputi berbagai tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat

c. Data Tersier :

Menggunakan kamus maupun peta yang nantinya akan mendukung menjelaskan permasalahan.

### **3.2 Teknik dan Pengumpulan Data**

Dalam hal ini, penulis akan mencari, mengumpulkan dan mengolah data-data yang berkaitan dengan kasus perikanan yang ada di pengadilan Negeri Medan, selain itu nantinya juga akan dilakukan wawancara dengan para hakim yang menangani kasus-kasus perikanan di wilayah hukum Pengadilan Medan. pejabat pemerintah dan praktisi bidang perikanan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan pembahasan.

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian sosiologis dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara mengalisa dan mengkaji kondisi dilapangan terhadap implementasi dan kendala-kendala yang ditemukan di lapangan.

## **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **4.1. Kompetensi Pengadilan Perikanan Medan dalam Menangani Perkara Perikanan**

Menurut ajaran Montesquieu, kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan atau kekuasaan peradilan (kekuasaan yudikatif) berada ditangan badan peradilan yang terlepas dan bebas dari campur tangan legislatif dan eksekutif. Adapun bidang hukum yang demikian itu dinamakan hukum acara atau hukum formal, yakni rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mengajukan sesuatu perkara ke muka suatu badana peradilan serta cara-cara hakim memberikan suatu putusan; dapat juga dikatakan, suatu rangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara memelihara dan memepρθhkan hukum material.<sup>22</sup>

Hukum acara pidana ialah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan,

<sup>22</sup> Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 159

perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar hukum itu terjadi; dapat juga disebut rangkaian kaidah-kaidah hukum tentang cara memelihara dan mempertahankan Hukum Pidana Material.<sup>23</sup>

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahny gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.<sup>24</sup>

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Lingkungan kewenangan mengadili tersebut meliputi<sup>25</sup> :

- a. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).
- b. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutusa sengketa Tata Usaha Negara.
- d. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara pidana yang terdakwanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.

Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?”<sup>26</sup>

Khusus membahas mengenai pengadilan perikanan dilihat dari sudut pandang hukum beracara dalam hal ini kewenangan relatif yang

---

<sup>23</sup> Ibid, hal. 160

<sup>24</sup> <http://legalakses.com/kewenangan-mengadili/>

<sup>25</sup> ibid

<sup>26</sup> ibid

berlaku, sebagaimana yang diatur dalam UU no 45 tahun 2009 jo no 31 2004 tentang perikanan telah mengatur secara khusus hukum acara pidana. Hal-hal yang telah diatur mengenai hukum acara tersebut adalah mengenai barang bukti, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan di bidang perikanan. Sepanjang Belum diatur dalam uu Perikanan maka tetap berlaku pengaturan umum yang ada di dalam KUHAP. Jadi hukum acara pidana di bidang perikanan yang berlaku adalah UU Perikanan dan KUHAP dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis*<sup>27</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara lepas dengan Pak Wahyu, Pantera Muda Bidang Pidana Khusus Perikanan dan berdasarkan UU Perikanan, menjelaskan bahwa untuk pengadilan Perikanan di Medan, kewenangan pengadilan perikanan Medan disesuaikan dengan UU Perikanan itu sendiri. Berdasarkan UU Perikanan pasal 74, menjelaskan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Bila merujuk kepada peraturan perikanan maka kewenangannya pengadilan perikanan meliputi tabel berikut :

Tabel 4.1. Perbandingan Kewenangan Pengadilan Perikanan

No.	Perbedaan	UU 31/2004	UU 45/2007
1.	Keberadaan posisi perkara	Pasal 71 a 2, Berada di lingkungan peradilan umum	Pasal 71 a 2, Merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum
2.	Daerah hukum pengadilan perikanan	Pasal 71 a 4 Daerah hukum pengadilan perikanan sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan	Pasal 71 A, Pengadilan perikanan berwenang atas perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan NKRI, baik yang dilakukan wni maupun wna
3.	Kedudukan pengadilan perikanan	Tidak ada menjelaskan kedudukan pengadilan perikanan yang ada	Pasal 71 a 4, Pengadilan perikanan berkedudukan di

<sup>27</sup> Op. Cit, Gatot....., Hal. 66

		hanya menjelaskan pembentukan pengadilan perikanan di PN Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual (Pasal 71 a 4)	Pengadilan Negeri
--	--	---	-------------------

Sumber data : Olahan peneliti atas Pasal 71 Undang-undang Perikanan yang ada

Dari penelitian perundang-undangan dan pelaksanaan di lapangan dalam hal ini Pengadilan Perikanan Negeri Medan, terdapat kekurangan dan ketidak jelasan dari perintah undang-undang terhadap luasnya wilayah hukum pengadilan perikanan Medan. Khusus untuk undang-undang perikanan yang terbaru yaitu UU no 45/2009 tentang Perikanan di dalam pasal 71 huruf A, sudah lebih baik dan lebih jelas memberikan pengertian bahwa pengadilan perikanan mempunyai yurisdiksi atas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NKRI. Namun yang menjadi pertanyaan disini adalah WPP NKRI yang manakah yang menjadi kompetensi pengadilan perikanan Medan? Karena tidak ada pembatasan dari Undang-undang Perikanan yang ada.

Mengingat WPP NKRI meliputi 11 wilayah pengelolaan perikanan antara lain :

1. WPP-RI 571 Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman
2. WPP-RI 572 Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda
3. WPP-RI 573 Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat
4. WPP-RI 711 Perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan.
5. WPP-RI 712 Perairan Laut Jawa.
6. WPP-RI 713 Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali
7. WPP-RI 714 Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda.
8. WPP-RI 715 Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau.
9. WPP-RI 716 Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera.
10. WPP-RI 717 Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.
11. WPP-RI 718 Perairan Teluk Aru, Laut Arafura dan Laut Timor bagian Timur.

Sehingga dengan tiadanya ketegasan dari undang-undang, terdapat kekosongan hukum dari penegakan hukum pidana perikanan tersebut, penentuan WPP bagi tiap-tiap pengadilan diperlukan agar aparat penegak hukum seperti polisi air, DKP, maupun TNI AL akan mudah dalam mengkoordinasikan kemana kasus pidana perikanan ini akan dilimpahkan serta berkaitan juga dengan tertip administrasi dan kemudahan eksekusi.

Berikut adalah nama-nama dari Hakim dan Hakim Ad-Hooc Perikanan PN Klas I A Medan yang ada saat ini :

1. Ketua PN : Erwin M. Malau, SH, MH.
2. WKPN : Surya Perdamaian, SH
3. E.T. Pasaribu, SH. MH : Hakim
4. Hj. Leliwati, SH.MH : Hakim
5. Kawit Riyanto, SH : Hakim
6. Drs. M. Hutajulu, SH, MH : Hakim ad hooc
7. M. Joni Kemri, Spi : Hakim ad hooc
8. Mursito, Spi : Hakim Ad Hooc
9. Junun, SH, Msi : Hakim ad Hook

Hakim-hakim diatas adalah hakim-hakim yang saat ini aktif bertugas dan berdinas di Pengadilan Perikanan Medan, terutama untuk hakim ad hook, posisi hakim ini kadang juga dipengaruhi oleh masa jabatan di instansi tempat mereka bekerja, meskipun pada dasarnya walau dimanapun mereka berada bila masa ikatan dinas sebagai hakim ad-hook (5 th) masih berjalan maka mereka bila sudah pindah berdinas keluar kota tetap masih bisa dipanggil untuk menjadi hakim adHook sesuai dengan surat tugas yang mereka terima. Mengingat terdapat 3 orang hakim ad hook yang berasal dari dinas perikanan tidak lagi bertugas di Medan namun nama mereka masih terdaftar di papan pengumuman PN Medan antara lain; Dr. Ir. M Indah GT, MM., Ir. Thomas W. Keliat, M.Eng., Ir. Wahyu Asri, M.Si.

#### **4.2. Kasus-Kasus pidana perikanan yang ditangani oleh Pengadilan Perikanan Medan pasca dikeluarkannya UU Perikanan**

Sesuai dengan amanat Undang-undang perikanan Nomor 31/2004 yang awal mulanya dibentuk pada Oktober 2004, dan dalam Pasal 71 a 5 menyebutkan “pengadilan perikanan mesti melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal Undang-undang ini berlaku, maka pengadilan perikanan di Medan juga langsung dibentuk.

Berikut data pidana perikanan dalam jangka waktu 6 Tahun terakhir, yang didapat dari pengadilan perikanan Medan ;

**Tabel 4.2. Jumlah Tindak Pidana Perikanan**

No. Urut	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2007	3	Penanganan kasus masih berada dibawah Pidum
2	2008	18	
3	2009	31	
4	2010	15	
5	2011	20	
6	2012	7	Sudah ditangani oleh Pidsus Perikanan

Sumber data : Pengadilan Perikanan PN Medan

Dari penjelasan tabel diatas tampak bahwa, pasca dikeluarkannya Undang-undang Perikanan yang baru nomor 45 tahun 2009 pasal 71 ayat 2 yang memerintahkan bahwa pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus namun dilapangan ternyata baru dapat terlaksana pada tahun 2012 dengan bapak Wahyu Prabowo sebagai Kepala Pidana Khusus Perikanan PN Medan.

Meskipun undang-undang sudah mengamanatkan bahwa kasus-kasus perikanan mesti masuk ke pengadilan perikanan, namun ternyata implementasi dilapangan terlihat bahwa penanganan kasus dibawah pidana khusus baru dapat terealisasi pada tahun 2012, kondisi ini membuktikan bahwa implementasi dilapangan aparat penegak hukum belum siap dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kurangnya jumlah aparat penegak hukum di lingkungan pengadilan selain itu keahlian dalam bidang perikanan juga masih kurang karena khusus mengenai masalah perikanan juga mesti mengetahui beberapa aspek teknis yang berkaitan dengan perikanan, alat tangkap, dll.

#### **4.3. Tantangan dan hambatan dalam melakukan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Medan**

Bahwa pada dasarnya penyelesaian kasus perikanan selalu terbentur pada alat dan barang bukti, dimana barang bukti merupakan istilah yang dimunculkan dalam Pasal 76A, Pasal 76 b dan Pasal 76 C. Untuk barang bukti ini mengalami kendala mengingat didalam hukum acara pidana antara barang bukti, alat bukti dan barang sitaan mengandung makna yang berbeda. Sedangkan dalam uu nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan substansi pasal lebih condong kearah barang sitaan namun perintilahan menggunakan istilah barang bukti. Bahkan kadang kala perkara juga terbentur dari ketidakhadiran tersangka, baik

karena telah melarikan diri maupun karena terkendala waktu untuk mendatangkan terdakwa ke Medan.<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wahyu sebagai Kepala Pidana Khusus Perikanan, hambatan lain yang sering dialami dalam proses peradilan adalah dalam hal bahasa dimana rata-rata para pencuri ikan yang bukan WNI banyak yang tidak menguasai bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, sehingga dalam proses persidangan kadang agak terhambat.

## **E. Kesimpulan dan Saran**

### **5.1. Kesimpulan**

Bahwa pengadilan perikanan Medan mempunyai kewenangan pengadili perkara pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia. Hanya saja sangat disayangkan, bahwa didalam UU Perikanan tersebut tidak satupun menjelaskan pembagian tiap-tiap pengadilan perikanan tersebut, karena WPP RI itu sendiri terbagi atas 11 wilayah pengelolaan perikanan yang meliputi pembagian wilayah pengelolaan laut-laut dan selat yang ada berdasarkan kedekatan wilayah.

Sedangkan penanganan kasus pidana perikanan saat ini berada dibawah tindak pidana khusus. Dalam menyelesaikan perkara proses pembuktian di persidangan mengalami kelemahan tidak hanya dari beda peristilahan barang /dan atau alat bukti dengan barang sitaan sehingga akan membuat kegalauan dalam proses pembuktian di depan persidangan. Selain itu ternyata masalah bahasa juga mendapatkan perhatian dalam praktek dilapangan dimana pada beberapa kasus, para tersangka ada yang tidak bisa berbahasa Inggris apalagi berbahasa Indonesia.

### **5.2. Saran**

Sesuai uraian di atas, maka untuk memberikan perbaikan dan pengembangan ilmu pengetahuan maka saran atas penelitian ini adalah :

1. Pemerintah mesti segera menetapkan batasan pengertian dari wilayah pengelolaan perikanan sehingga akan tampak jelas batasan kewenangan suatu pengadilan perikanan.
2. Perlunya koordinasi dan teknologi yang modern bagi pengadilan pidana perikanan khususnya di Medan, mengingat kasus dan pelaku tindak pidana kadangkala

---

<sup>28</sup> Wawancara lepas dengan Bapak Wahyu (Kapidsus) dan Bapak Erwin (Ka-PP) di Pengadilan Perikanan Medan.

- bisa saja berada di pulau-pulau terluar ataupun di titik-titik tertentu pangkalan TNI AL, sehingga bila perlu proses persidangan dapat dilakukan dengan jalan online / melalui media cangguh lainnya.
3. Perlunya penyempurnaan atas istilah-istilah barang bukti, alat bukti ataupun sitaan yang dipergunakan dalam pembuktian sehingga nantinya tidak akan menjadi bias dalam penyelenggaraan pembuktian saat persidangan.

### Daftar Pustaka

- Dian Saptarini, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Wilayah Pesisir*, Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) dengan Kementrian Negara Lingkungan Hidup (Pusat Studi Lingkungan), Jakarta, 1996
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993
- Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigama Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005)
- Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, 2007
- Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana di luar KUHP)*, Restu Agung, Jakarta, 2009
- Supriadi, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f84f7fe8617f/indonesia-didesaknaikkan-sanksi-iillegal-fishing-i>, diunduh pada Rabu, 2 Mei 2012, pukul 11.01 wib.
- [http://jurnal-dfp.blogspot.com/2008\\_02\\_01\\_archive.html](http://jurnal-dfp.blogspot.com/2008_02_01_archive.html), diunduh pada rabu, 2 Mei 2012,
- <http://legalakses.com/kewenangan-mengadili/>, diunduh pada 18 November 2012



**Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan**

**Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang : Pengesahan United Nations  
Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa  
Bangsa Tentang Hukum Laut)**

**Wawancara :**

**Bapak Erwin M. Malau, Ketua Pengadilan Perikanan Medan**

**Bapak Wahyu Prabowo, Kepala Pidana Khusus Pengadilan Perikanan  
Medan**